



Bab 3

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan Kota Kendari adalah APBD Kota Kendari kebijakan pengalokasian pembiayaan yang di tempuh oleh Pemerintah Kota Kendari dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan secara umum di tetapkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) sesuai dengan urutan prioritas berdasarkan issu pokok .

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah salah satu komponen terpenting dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah karena merupakan motor penggerak dan setiap pendapatan daerah harus tercatat dalam dokumen APBD dimana anggaran ini setiap tahunnya akan menjadi pokok pembahasan pertama antara lembaga legislatif dan eksekutif, untuk itulah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun 2007 perlu ditampilkan kondisi keuangan.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Penyusunan APBD setiap dilakukan dengan memproyeksikan pendapatan dan proyeksi pendapatan tentunya memperhatikan pos-pos sumber penerimaan baik itu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, dari berbagai macam sumber penerimaan yang setiap tahunnya, namun ada sumber penerimaan yang memiliki tren kenaikan setiap tahunnya dapat dijadikan primadona pendapatan, sedangkan sumber penerimaan yang penerimanya berfluktuasi cukup dipertahankan menjadi sumber penerimaan pendapatan, upaya intensifikasi sumber-sumber penerimaan terus dilakukan.

Kota Kendari sebagai ibukota propinsi sumber pendapatan yang menjadi primadona adalah pada pos pajak daerah, antara lain; pajak hotel, pajak



restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian "C" sedangkan pada sumber penerimaan retribusi adalah retribusi kesehatan, retribusi mendirikan bangunan, retribusi izin perdagangan, dan retribusi jasa umum konstruksi, sehingga sumber penerimaan ini terus dilakukan intensifikasi.

Mengingat kebutuhan pembelanjaan Pemerintah Kota cenderung meningkat dalam setiap tahunnya, maka perlu dilakukan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan; seperti retribusi pelayanan kesehatan yang tadinya untuk Puskesmas dimasukan ke Pos penerimaan Dinas Kesehatan, maka sejak tahun 2005 Pos Puskesmas telah menyetor langsung penerimaannya ke Kas Pemda Kota, juga termasuk retribusi izin praktek yang tadinya tidak di target, namun setelah dilakukan ekstensifikasi dapat memberikan kontribusi penerimaan pendapatan daerah.

Ada beberapa langkah - langkah yang harus dilakukan untuk merealisasikan pencapaian target tersebut :

1. Melaksanakan intensifikasi Pendapatan Daerah dengan :

- o Memfasilitasi penyesuaian Perda - Perda Penerimaan Daerah yang berkaitan dengan pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- o Meningkatkan tertib administrasi dan pengawasan pemungutan sumber- sumber PAD

2. Melaksanakan ekstensifikasi Pendapatan Daerah dengan :

- o Melakukan pendataan subyek dan obyek baru Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- o Memfasilitasi penerbitan Perda - Perda baru Penerimaan Daerah.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan perhitungan akhir Tahun Anggaran 2007 Pendapatan Daerah Kota Kendari dari target sebesar Rp.384.117.053.193,00 realisasi penerimaan sebesar Rp. 391.667.713.991,14 yang terdiri dari sisa lebih perhitungan tahun lalu sebesar Rp. 55.883.305.427,00 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 28.159.253.500,82 yang terdiri dari: Pajak Daerah



sebesar Rp. 9.288.681.252 Retribusi Daerah sebesar Rp. 7.976.615.535 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 1.341.247.229 Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 9.552.709.484,82 Dana Perimbangan sebesar Rp. 351.473.004.434 yang terdiri dari : Dana Bagi Hasil Pajak/ bukan pajak sebesar Rp. 26.222.199.034 Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 288.371.805.400 Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 36.879.000.000 Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp.12.035.456.056,32.

Tabel 3.1 Pendapatan Daerah tahun 2007

No	Uraian Pendapatan Tahun 2007	Target (Rp.)	Realisasi (Rp)
1	Target Pendapatan	384.117.053.193,00	
2	Realisasi penerimaan		391.667.713.991,14
3	Sisa lebih perhitungan tahun lalu	55.883.305.427,00	55.883.305.427,00
4	Pendapatan Asli Daerah	23.277.791.368,00	28.159.253.500,82
	- pajak daerah	8.247.041.750,00	9.288.681.252,00
	- retribusi daerah	9.191.526.000,00	7.976.615.535,00
	- Hasil pengelolaan kekayaan	304.022.149,00	1.341.247.229,00
	- Lain-lain pendapatan sah	5.535.201.469,00	9.552.709.484,82
5	Dana Perimbangan	348.903.508.851,00	351.473.004.434,00
	- dana bagi hasil pajak/bkn pajak	25.774.508.851,00	26.222.199.034,00
	- Dana alokasi umum	286.250.000.000,00	288.371.805.400,00
	- Dana Alokasi khusus	36.879.000.000,00	36.879.000.000,00
	- lain-lain penerimaan yang sah	11.935.752.974,00	12.035.456.056,32

Sumber : DPPKAD, 2007

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2007, Pendapatan Daerah Kota sebesar Rp. 384.117.053.193,00 sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 23.277.791.368,00 yang terdiri dari: Pajak Daerah sebesar Rp. 8.247.041.750,00 Retribusi Daerah sebesar Rp. 9.191.526.000,00 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 304.022.149,00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 5.535.201.469,00



Dana perimbangan sebesar Rp. 348.903.508.851,00 terdiri dari: bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp. 25.774.508.851,00 Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.286.250.000.000,00 Dana Alokasi Khusus Rp. 36.879.000.000,00. Lain-lain pendapatan yang sah Rp. 11.935.752.974,00

3. Permasalahan dan Solusi.

Untuk menjalankan roda Pemerintahan yang baik dibutuhkan pembiayaan yang memadai, memang Pemerintah bukanlah organisasi profit atau sejenisnya, namun paling tidak diperlukan biaya untuk gaji pegawai dan biaya operasional, investasi pembangunan infrastruktur serta mendorong peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga stabilitas wilayah; dengan demikian Pemerintah Kota harus berupaya untuk mencari pendapatan sebanyak-banyaknya dengan tidak memberatkan masyarakatnya; untuk itulah Pemerintah Kota melalui Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) dalam penentuan target pendapatan perlu memperhatikan beberapa indikator yang mempengaruhi langsung dan selalu menjadi pertimbangan, adalah :

- ❖ Potensi sumber penerimaan baru
- ❖ Optimalisasi pemungutan
- ❖ Pertumbuhan penduduk
- ❖ Laju inflasi
- ❖ Fluktuasi harga di pasaran
- ❖ Kemampuan daya beli masyarakat

Berangkat dari indikator pengaruh tersebut, maka dalam pelaksanaannya sering mendapatkan berbagai permasalahan, antara lain:

- a. masih ada sebagian masyarakat yang tingkat kesadaran untuk membayar pajak sangat rendah, selain itu adanya penunggakan pajak oleh obyek pajak dengan berbagai alasan.
- b. Adanya usaha-usaha yang tutup sementara akibat perbaikan manajemen, renovasi, dan lain-lain.



- c. Masih adanya aparat pemungut/penagih yang kinerjanya rendah artinya bekerja asal-asalan dan tidak serius dalam melakukan penagihan.
- d. Keengganan para pengusaha/obyek pajak untuk dinaikan pajaknya dengan alasan biaya operasional perusahaan sangat tinggi.
- e. Kurang efektifnya pemberlakuan sistim bill pada obyek pajak
- f. Masih adanya obyek pajak/pelaku usaha yang mengeluarkan biaya-biaya lain sehingga menimbulkan biaya tinggi.
- g. Adanya aturan-aturan yang tidak sesuai dengan perkembangan utamanya mengenai tarif pengenaan pajak dan retribusi, sehingga perlu dilakukan revisi atau perubahan peraturan.

Dari permasalahan tersebut telah dilakukan langkah-langkah pemecahan atau solusinya; antara lain :

- a. Dinas pendapatan terus melakukan sosialisasi ke Kecamatan-kecamatan dengan mengundang *stakeholders* yang ada di wilayah kecamatan bersangkutan.
- b. Bagi usaha yang tutup atau berhenti sementara usahanya terus dilakukan pemantauan untuk dilakukan pembinaan dan bimbingan serta memberikan alternatif usaha baru.
- c. Terus melakukan evaluasi kepada aparat penagih dan dilakukan pembinaan secara terus menerus serta memindahkan aparat petugas pemungut ketempat lain, jika di tempatnya dia bekerja aparat tersebut dirasakan kurang nyaman.
- d. Dilakukan pendekatan persuasif kepada obyek pajak jika enggan untuk dinaikan dan bahkan sebelum dinaikan dari Pihak Dinas PPKAD melakukan uji petik selama sebulan bahkan lebih agar dapat diketahui secara pasti omset produksi yang laku terjual dan wajib dikenakan pajak.
- e. Karena ketidak efektifan penggunaan bill, maka Dinas PPKAD melakukan target pembayaran rata-rata setiap bulannya berdasar hasil uji petik.



- f. Untuk pengeluaran tidak resmi yang dapat menimbulkan biaya tinggi, maka Pemerintah Kota melakukan upaya-upaya koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya.
- g. Aturan yang tidak sesuai perkembangan akan dilakukan revisi walau pelaksanaan secara bertahap khususnya Perda-perda yang menyangkut pendapatan dari sektor Pajak dan retribusi.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan daerah.

Kebutuhan pembiayaan setiap tahunnya terus meningkat hal ini di sebabkan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, perbaikan organisasi, peningkatan sumber daya aparat, perbaikan infrastruktur juga adanya penerimaan pegawai baru untuk mendukung kekurangan tenaga pegawai negeri sipil, selain itu program strategis khususnya dalam pengentasan kemiskinan juga meningkat, untuk itu di upayakan meningkat antara 10 -20 %.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam priode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang keuangan negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Tidak langsung.

Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang di alokasikan atau digunakan membiayai kegiatan untuk memenuhi kepentingan aparatur yang hasilnya tidak secara langsung dinikmati masyarakat.



Kebijakan - kebijakan yang akan ditempuh dalam Belanja tidak langsung adalah Pengalokasian anggaran secara proporsional yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan utama seperti :

1. Peningkatan mutu SDM Aparatur melalui Diklat Penjenjangan dan Teknis Fungsional.
2. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan Publik.

Belanja Langsung.

Belanja langsung adalah bagian belanja yang dialokasikan atau digunakan membiayai kegiatan untuk memenuhi kepentingan publik yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati masyarakat.

Kebijakan - kebijakan yang akan ditempuh dalam Belanja Publik adalah Pengalokasian anggaran secara proporsional yang diarahkan kepada Program-program Pemerataan/pemenuhan kebutuhan utama masyarakat, program strategis dan program inovasi, yang terakumulasi dalam 8(delapan) isu sesuai visi dan misi.

2. Target dan Realisasi Belanja

Sesuai APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2007 target belanja sebesar Rp. 437.179.316.128 yang merupakan jumlah total dari: Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai, belanja bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja bantuan social, Belanja bagi hasil, Belanja bantuan keuangan dan Belanja tidak terduga) sedangkan Belanja Langsung (belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja modal) dari target jumlah belanja dalam perjalanannya realisasi belanja menjadi sebesar Rp. 385.607.758.431 yang terbagi kedalam: Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.207.076.773.248,00 terdiri dari: Belanja Pegawai sebesar Rp.186.723.857.842,00 belanja bunga sebesar Rp.166.855.805, belanja subsidi Rp.90.000.000,00 belanja bantuan social sebesar Rp.19.145.260.706,00 serta belanja tak terduga sebesar Rp.950.798.895,00, sedangkan Belanja Langsung sebesar



Rp.178.530.985.183,00 terdiri dari belanja Pegawai sebesar Rp.25.962.410.452 belanja barang dan jasa sebesar Rp.66.047.883.817,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.86.520.690.914,00. jika dibandingkan antara pendapatan dan belanja, maka terjadi surplus anggaran sebesar Rp.55.883.305.427,00 yang bersumber dari pos sisa lebih perhitungan (SILPA), sedangkan sisa dari pos dimaksud diperuntukan bagi penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah sebesar Rp.2.660.961.772,00 dan pembayaran utang pokok yang jatuh tempo sebesar Rp.160.080.720,36

Tabel 3.1. Belanja Daerah tahun 2007

No	Uraian Belanja Tahun 2007	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	APBD Kota Kendari Thn. 2007	437.179.316.128	385.607.758.431
2	Belanja Tidak Langsung	239.101.952.952,00	207.076.773.248,00
	- Belanja pegawai	216.481.425.947,00	186.723.857.842,00
	- Belanja bunga	166.855.805,00	166.855.805,00
	- Belanja subsidi	1.090.000.000.,00	90.000.000,00
	- Belanja hibah		
	- Belanja bantuan sosial	19.963.671.200,00	19.145.260.706,00
	- Belanja bagi hasil		
	- Belanja bantuan keuangan		
	- Belanja tidak terduga	1.400.000.000,00	950.798.895,00
3	Belanja Langsung	198.077.363.176,00	178.530.985.183,00
	- belanja Pegawai	29.040.290.815,00	25.962.410.452,00
	- belanja barang dan jasa	72.286.214.789,00	66.047.883.817,00
	- belanja Modal	96.750.857.572,00	86.520.690.914,00
	Jumlah Belanja	437.179.316.128,00	385.607.758.431,00
4	Surplus/(Defisit) belanja	(53.062.262.935,00)	6.059.955.560,14
6	Sisa Lebih hasil perhitungan	55.883.305.427,00	55.883.305.427,00
	- penyertaan modal	2.660.961.772,00	
	-Pembayaran utang jatuh tempo	160.080.720,36	

Sumber : Dinas PPKAD, 2007



Dari uraian tersebut, bahwa APBD Kota Kendari tahun anggaran 2007 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2006 terjadi kenaikan yang cukup tinggi yakni 29 %, hal ini karena di tahun 2007 terjadi kenaikan BBM yang berdampak terhadap harga-harga dipasaran serta rencana Pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil termasuk rencana penerimaan pegawai yang diberlakukan pada tahun 2007, dengan pertimbangan tersebut Pemerintah Pusat menaikkan Dana Alokasi Umum (DAU). Selanjutnya dengan memperhatikan kebijakan makro ekonomi kota serta sasaran program prioritas strategis yang ingin di capai, maka Pendapatan Daerah Kota Kendari pada waktu diproyeksikan kenaikannya sekitar 10 % - 15 % dari tahun anggaran sebelumnya.

Untuk tahun anggaran 2007 terjadi surplus anggaran, hal ini dapat dicapai karena adanya efisiensi disemua pos pengeluaran baik belanja aparatur maupun belanja publik sebagaimana gambaran pada tabel tersebut diatas.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam priode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang keuangan negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

1. Belanja Tidak Langsung.

Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja yang di alokasikan atau digunakan membiayai kegiatan untuk memenuhi kepentingan yang hasilnya tidak secara langsung dinikmati masyarakat.

Kebijakan - kebijakan yang akan ditempuh dalam Belanja Tidak langsung adalah Pengalokasian anggaran secara proporsional yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan utama seperti :

1. Peningkatan mutu SDM Aparatur melalui Diklat Penjenjangan dan Teknis Fungsional.
2. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



2. Belanja Langsung

Belanja LANGsung adalah bagian belanja yang dialokasikan atau digunakan membiayai kegiatan untuk memenuhi kepentingan publik yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati masyarakat.

Kebijakan - kebijakan yang akan ditempuh dalam Belanja langsung adalah pengalokasian anggaran secara proporsional yang diarahkan kepada program-program pemerataan/pemenuhan kebutuhan utama masyarakat, program strategis dan program inovasi, yang terakumulasi dalam 8(delapan) isu sesuai visi dan misi.

3. Permasalahan dan Solusi.

Mengingat Kota Kendari sebagai ibukota Provinsi yang mengalami perkembangan dan kemajuan sangat cepat serta dinamika masyarakat cukup tinggi, maka dalam perjalannya APBD Kota Kendari perlu melakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang terjadi, untuk itu ada beberapa permasalahan yang sering ditemui dalam pengelolaan belanja daerah :

Permasalahan

- a. Walaupun APBD telah ditetapkan, namun dari perkembangan dan kondisi situasi wilayah yang sangat cepat terjadi perubahan, maka perlu dilakukan penyesuaian APBD akibatnya akan mempengaruhi pencatatan dan pembukuan APBD secara keseluruhan, karena setiap perubahan kegiatan sangat mempengaruhi sistem pencatatan secara keseluruhan.
- b. Sulitnya mempertahankan target yang telah disepakati bersama karena banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi APBD.
- c. Adanya program-program kegiatan yang ditetapkan dan ketika akan dilaksanakan timbul berbagai permasalahan akibat terjadi perubahan kondisi secara tiba-tiba.



-
- d. Sumber daya manusia khususnya dibidang perencanaan masih dianggap rendah, sehingga ada program yang diusulkan tidak sesuai dengan strategi ataupun kebijakan program Kota yang telah ditetapkan dalam Program Jangka Menengah.

Solusi

- a. Sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi khususnya pada bidang keuangan akan terus ditingkatkan termasuk didalamnya pengguna software (sistem komputerisasi).
- b. Dalam rangka peningkatan kinerja keuangan, maka tetap mengacu pada pencapaian nilai manfaat dan efisiensi anggaran.
- c. Prinsip fleksibilitas program tetap akan menjadi acuan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan kondisi secara tiba-tiba.
- d. Perlu adanya pemantapan program dan kegiatan SKPD sesuai dengan RPJMD 2008-2012 dan visi dan misi.